

Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang,
Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP)

Ringkasan Laporan Dasar (Baseline) 2020

Ikhtisar Temuan



3 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan Laporan Tahunan 2020 yang tersedia bagi publik pada tahun 2021.



2 dari 10 Para Pihak ACTIP mempublikasikan data tren 3-5 tahun tentang indikator utama TPPO.



2 dari 10 Para Pihak ACTIP dapat melaporkan empat indikator penanganan kasus TPPO.



1 dari 10 Para Pihak ACTIP mempublikasikan data tentang hasil atas kasus pengadilan tingkat pertama yang diputus pada tahun 2020.



2 dari 10 Para Pihak ACTIP mempublikasikan data jumlah kasus Perdagangan Orang yang diputus pada pengadilan tingkat pertama pada tahun 2020.



0 dari 10 Para Pihak ACTIP mempublikasikan data persentasi kasus-kasus TPPO yang diputus pada tahun 2020 dengan hasil korban menerima kompensasi.



2 dari 10 Para Pihak ACTIP mempublikasikan data tentang kasus-kasus TPPO yang mengajukan korban menerima bantuan hukum.



1 dari 10 Para Pihak ACTIP mempublikasikan data tentang jumlah korban yang bersedia memberikan kesaksian lewat video sebelum persidangan pada tahun 2020.



4 dari 10 Para Pihak ACTIP mempublikasikan data korban berdasarkan jenis kelamin.



4 dari 10 Para Pihak ACTIP mempublikasikan data korban berdasarkan usia.



0 dari 10 Para Pihak ACTIP mempublikasikan data korban berdasarkan disabilitas.



2 dari 10 Para Pihak ACTIP mempublikasikan Laporan Tahunan TPPO 2020 yang menyajikan jumlah penyidikan, penuntutan, atau vonis terhadap pejabat yang terlibat dalam perdagangan orang.



1 dari 10 Para Pihak ACTIP mempublikasikan vonis putusan pengadilan tentang TPPO yang dijatuhkan pada tahun 2020.

Ringkasan Laporan Dasar (Baseline) 2020

Ikhtisar: Rekomendasi

- 1** ASEAN-ACT bekerjasama dengan ASEAN membantu Para Pihak ACTIP untuk mempublikasikan Laporan Tahunan TPPO mereka.
- 2** ASEAN-ACT bekerjasama dengan Para Pihak ACTIP yang berminat untuk membantu memaparkan data kecenderungan yang menyajikan perkembangan tahun ke tahun data utama Perdagangan Orang agar dapat lebih memahami pola dalam kasus-kasus TPPO.
- 3** ASEAN-ACT bekerja sama dengan Para Pihak ACTIP untuk memperbaiki pengumpulan dan analisis data Perdagangan Orang.
- 4** ASEAN-ACT TPPO mereka terkait kasus-kasus perdagangan orang yang dilabekerjasama dengan Para Pihak ACTIP untuk mempublikasikan data dalam Laporan Tahunan bahkan dan diselesaikan pada tahun pelaporan dan hasil atas kasus-kasus tersebut.
- 5** ASEAN-ACT bekerjasama dengan Para Pihak ACTIP untuk mempublikasikan data dalam Laporan Tahunan TIP tentang dukungan yang diberikan kepada korban perdagangan orang termasuk kompensasi, bantuan hukum dan kesaksian video yang direkam sebelum persidangan.
- 6** ASEAN-ACT bekerjasama dengan Para Pihak ACTIP untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mempublikasikan data terkait korban perdagangan orang berdasarkan jenis kelamin, usia, dan status disabilitas.
- 7** ASEAN ACT bekerjasama dengan Para Pihak ACTIP untuk mempublikasikan jumlah penyidikan, penuntutan, atau vonis terhadap pejabat yang terlibat dalam perdagangan orang dalam Laporan Tahunan TPPO 2020 mereka.
- 8** ASEAN-ACT bekerjasama dengan Para Pihak ACTIP untuk meningkatkan transparansi keputusan terkait dengan perdagangan orang melalui publikasi keputusan yang telah melalui penyuntingan.

Pendekatan yang sensitif terhadap korban dalam kasus-kasus TPPO:

22 Indikator Kinerja Kunci Data

Negara anggota ASEAN mengidentifikasi perlakuan sensitif terhadap korban dalam kasus-kasus TPPO sebagai prioritas dalam Konvensi.

Sebagian besar Negara Anggota ASEAN telah mengumpulkan cukup banyak data tentang kasus perdagangan orang. Namun, Negara Anggota ASEAN dapat mempertimbangkan untuk menyajikan 22 indikator data berikut ini dalam Laporan Tahunan Perdagangan Orang nasional mereka. Sebagian besar Negara Anggota ASEAN telah mengumpulkan data ini dan pencantumannya dalam Laporan Tahunan Perdagangan Orang nasional akan memberikan gambaran sejauh mana Negara Anggota tersebut melaksanakan kewajiban Konvensi mereka dan pengalaman para korban perdagangan orang dalam proses ini jika mereka memilih untuk menjadi saksi dalam proses pidana atau mengajukan kasus perdata untuk mendapatkan kompensasi.

Data KPI di bawah ini mendukung Prinsip dan Pedoman yang Direkomendasikan tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Orang yang disusun oleh Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta 8 Indikator Sensitif Korban dan Pedoman pelaksanaannya yang disusun oleh ASEAN-ACT.

Pembahasan lebih rinci mengenai 22 Indikator Kinerja Kunci Data dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Toolkit ASEAN-ACT untuk Indikator Kinerja Kunci Data: Menyusun Dasar Bukti untuk Pendekatan Sensitif Korban terhadap Perdagangan Orang di Seluruh Kawasan ASEAN.





NEGARA-NEGARA ASEAN MEMPUBLIKASIKAN LAPORAN TAHUNAN TPPO YANG PENTING BAGI



NEGARA ANGGOTA ASEAN

yang menandatangani
Konvensi ASEAN
menentang Perdagangan
Orang, Terutama
Perempuan dan Anak
pada tahun 2015

karena mereka
berkomitmen untuk
bekerjasama dalam
upaya menentang Tindak
Pidana Perdagangan
Orang.

Publikasi Laporan
Tahunan TPPO
membangun dasar bukti
untuk mengevaluasi
apakah hasil pekerjaan
mereka membawa
dampak.



LEMBAGA PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH

yang menyediakan
penampungan, bantuan
hukum, layanan medis
dan konseling bagi korban

karena mereka
berkontribusi pada
pengumpulan dan
analisis data TPPO
untuk memberikan
berbagai layanan secara
efektif kepada para
korban perdagangan
orang



KORBAN TPPO

karena mereka
membutuhkan
informasi tertentu
untuk membuat
keputusan yang
tepat tentang
apakah mereka
akan memberikan
bukti dalam kasus
TPPO.



LEMBAGA PERADILAN NASIONAL

seperti kepolisian,
kejaksaan dan
pengadilan

karena mereka
mengandalkan
saksi dan korban
untuk memberikan
bukti dalam kasus
TPPO.